



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

NOMOR: 900/Kep. 366-BKAD/2024

**TENTANG**

**PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LEBAK  
NOMOR: 900/KEP.450-BKAD/2023 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA  
PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 900/Kep.450-BKAD/2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 900/Kep. 275-BKAD/2024;
- b. bahwa terdapat usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di lingkungan Sekretariat Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan pada Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Nomor: 900/Kep.450-BKAD/2023 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran

Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 6);

8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 104 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 104);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 37);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Nomor: B.800.1.3.1/31-Subag Keu/X/2024, tanggal 16 Oktober 2024 perihal Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di Lingkungan Setda Lebak TA. 2024;

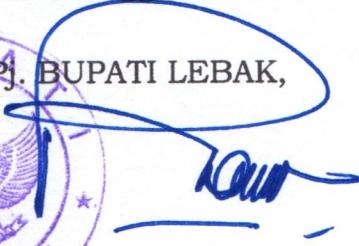
**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 900/KEP.450-BKAD/2023 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 900/Kep.450-BKAD/2023 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 18 Oktober 2024

Pj. BUPATI LEBAK,  
  
GUNAWAN RUSMINTO

Tembusan:

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Nomor : 900/Kep.366-BKAD/2024

Tanggal : 18 Oktober 2024

Tentang : Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Nomor: 900/Kep.450-BKAD/2023 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah

**BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : **SEKRETARIAT DAERAH**

NO	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	EMBAY RUSNENDI, S.Sos NIP. 19720121 201312 1 001	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Tidak Berubah
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Tidak Berubah
		<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Tidak Berubah
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Tidak Berubah
2	LILI FAZLI SUBASTIAN NIP. 198307272008011001	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Tidak Berubah
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Tidak Berubah
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Tidak Berubah
3	IRNA YULIANTI, S.H., NIP. 19880714 202012 2 006	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tidak Berubah
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Tidak Berubah
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Tidak Berubah
4	RATNAWATI NIP. 19790324 201409 2 001	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Tidak Berubah
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Tidak Berubah
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Tidak Berubah

NO	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
5	DADIE CHRISHADI  NIP. 19811225 201412 1 001	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Tidak Berubah
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Tidak Berubah
6	PHATMA SARI DEWI, A. MKL  NIP. 19840117 201001 2 007	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tidak Berubah
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Tidak Berubah
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tidak Berubah
7	WINDA DAHLIA, SE  NIP. 19850721 201412 2 001	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tidak Berubah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tidak Berubah
		<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tidak Berubah
		-	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
8	WAWAN SETIAWAN  NIP. 19780717 200801 1 011	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tidak Berubah
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tidak Berubah
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tidak Berubah
		Penyediaan Bahan/Material	Tidak Berubah
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tidak Berubah
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tidak Berubah
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tidak Berubah
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tidak Berubah

NO	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tidak Berubah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tidak Berubah
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tidak Berubah
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tidak Berubah
		-	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
		-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
9	AKHMAD MALIKUL AKBAR, S.Tr.IP NIP. 199704272021081001	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Penataan Organisasi</b>
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Tidak Berubah
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tidak Berubah
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tidak Berubah
10	MISRIADI NIP. 19750212 201312 1 001	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>
		Fasilitasi Keprotokolan	Tidak Berubah
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Tidak Berubah


  
**Pj. BUPATI LEBAK,**
  

  
**GUNAWAN RUSMINTO**